



UNIVERSITAS NASIONAL

**DINAMIKA DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA PEMINDAHAN IBU
KOTA NEGARA: PERUBAHAN STATUS, KEWENANGAN, DAN RELASI
Pemerintahan**

SKRIPSI

Ditujukan sebagai syarat salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana

MUKHBITAH ZAHROH ASSYAHIDAH

NPM. 223501516002

**PROGRAM STUDI ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

FEBRUARI 2026



NATIONAL UNIVERSITY

**DYNAMICS OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA AFTER THE
RELOCATION OF THE NATIONAL CAPITAL: CHANGES IN
STATUS, AUTHORITY, AND GOVERNMENT RELATIONS**

BACHELOR'S THESIS

Submitted as partial fulfilment of the requirements for the Bachelor

MUKHBITAH ZAHROH ASSYAHIDAH

NPM. 223501516002

POLITICAL SCIENCE

FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES

FEBRUARY, 2026



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukhbitah Zahroh Assyahidah

NPM : 223501516002

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : DINAMIKA DAERAH KHUSUS JAKARTA PASCA

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA: PERUBAHAN STATUS,

KEWENANGAN, DAN RELASI PEMERINTAHAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan – bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Nasional atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dengan peraturan yang berlaku di Universitas Nasional. Demikian pernyataan ini saya buat.

Jakarta, 13 Februari 2026

Yang membuat pernyataan,



Mukhbitah Zahroh A



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mukhbitah Zahroh Assyahidah

Nomor Pokok Mahasiswa : 223501516002

Program Studi : Ilmu Politik

Kekhususan : Otonomi Daerah


Judul Skripsi : **DINAMIKA DAERAH KHUSUS JAKARTA
PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA:
PERUBAHAN STATUS, KEWENANGAN DAN RELASI
PEMERINTAHAN**

Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Nasional

**Disetujui untuk diajukan,
Jakarta, 13 Februari 2026**

Dosen Pembimbing

Ketua Program Studi Ilmu
Politik


Dr. Safrizal, S.I.P., M.Si.


Yusuf Wibisono, S.I.P.,





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Mukhbitah Zahroh Assyahidah
NPM : 223501516002
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Dinamika Daerah Khusus Jakarta Pasca Pemindahan
Ibu Kota Negara: Perubahan Status, Kewenangan,
dan Relasi Pemerintahan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan Diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu politik pada Program Studi Ilmu politik, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Sahrudin, S.IP., M.Si
Penguji I : Dr. Asran Jalal, S.IP., M.Si.
Penguji II/Pembimbing : Dr. Safrizal, S.I.P., M.Si.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 10 Maret 2026

Sahrudin Jubs
(*Asran*)
(*Safrizal*)



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mukhbitah Zahroh Assyahidah

Nomor Pokok Mahasiswa : 223501516002

Program Studi : Ilmu Politik

Kekhususan : Otonomi Daerah

Judul Skripsi : DINAMIKA DAERAH KHUSUS JAKARTA
PASCA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA:
PERUBAHAN STATUS, KEWENANGAN DAN RELASI
PEMERINTAHAN

Diajukan Untuk : Memenuhi salah satu dari persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Nasional


Disahkan

Jakarta, Februari 2026

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik


Dr. Safrizal, S.I.P., M.Si.


Dr. Aos Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si.

ABSTRAK

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan kebijakan strategis nasional yang membawa implikasi signifikan terhadap status hukum, kewenangan, serta relasi pemerintahan Jakarta. Perubahan tersebut ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024. Dengan dicabutnya status Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), Jakarta tidak lagi berperan sebagai pusat pemerintahan nasional, melainkan diarahkan sebagai pusat ekonomi, bisnis, dan kota global.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi status hukum dan politik Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara serta mengkaji pola relasi politik antara Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah Pusat dalam struktur politik nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari anggota DPRD DKI Jakarta, staf ahli DPR RI, akademisi, dan pengamat politik. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori otonomi daerah, desentralisasi asimetris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi tidak hanya berupa perubahan nomenklatur administratif, melainkan mencerminkan redefinisi otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi asimetris. Jakarta sendiri tetap memiliki kekhususan kewenangan, terutama dalam bidang tata ruang, ekonomi transportasi, dan kerja sama internasional terbatas. Namun demikian, perubahan status ini juga menimbulkan potensi persoalan legalitas produk hukum, legitimasi kelembagaan, serta penyesuaian kewenangan legislatif DPRD dalam masa transisi. Dengan pola relasi antara Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dan Pemerintah Pusat cenderung bergerak menuju model koordinatif dan overlapping.

Kata Kunci: Daerah Khusus Jakarta, Pemindahan Ibu Kota Negara, Otonomi Daerah, Desentralisasi Asimetris, Relasi Pusat-Daerah.

ABSTRACT

The relocation of the nation's capital from Jakarta to the Indonesian Capital City (IKN) in East Kalimantan is a national strategic policy with significant implications for the legal status, authority, and government relations within Jakarta. This change was affirmed by Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta Province, which was later amended by Law Number 151 of 2024. With the revocation of the Special Capital Region (DKI) status and its transformation into the Special Region of Jakarta (DKJ), Jakarta no longer serves as the center of national government but is instead directed as an economic, business, and global city center.

This study aims to analyze the transformation of Jakarta's legal and political status following the relocation of the national capital and to examine the patterns of political relations between the Special Region of Jakarta Government and the Central Government within the national political structure. This research uses a qualitative approach with descriptive-analytical methods. Data collection techniques were conducted through literature review and in-depth interviews with informants consisting of members of the DKI Jakarta Regional People's Representative Council (DPRD), expert staff of the Indonesian House of Representatives (DPR RI), academics, and political observers. The analysis was conducted using the theories of regional autonomy and asymmetric decentralization. The results of this study indicate that the transformation is not merely a change in administrative nomenclature, but rather reflects a redefinition of regional autonomy within the framework of asymmetric decentralization. Jakarta itself retains its special authority, particularly in the areas of spatial planning, transportation economics, and limited international cooperation. However, this change in status also raises potential issues regarding the legality of legal products, institutional legitimacy, and the adjustment of the legislative authority of the Regional People's Representative Council (DPRD) during the transition period. The relationship between the Jakarta Special Region Government and the Central Government tends to shift toward a coordinative and overlapping model.

Keywords: *Special Region of Jakarta, Relocation of the National Capital, Regional Autonomy, Asymmetric Decentralization, Central-Regional Relations.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
2.2 Teori/Konsep.....	15
2.2.1 Teori Otonomi Daerah	15
2.2.2 Teori Desentralisasi dan Relasi Pusat-Daerah	20
2.3 Kerangka Pemikiran	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25

3.1	Pendekatan Penelitian.....	25
3.2	Teknik Pengumpulan Data	27
3.3	Teknik Keabsahan Data.....	28
3.4	Teknik Analisa Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		30
4.1	Sejarah Daerah Khusus Jakarta.....	30
4.4.1	Sejarah Hukum dan Pemerintahan Jakarta Pasca Kemerdekaan	33
4.2	Kewenangan dan Relasi Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta dengan Pemerintah Pusat.....	38
4.3	Pengaturan Ibu Kota Nusantara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	41
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN.....		44
5.1	Transformasi Status Hukum dan Politik Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara	44
5.1.1	Perspektif Yuridis dalam Perubahan Status Jakarta.....	48
5.2	Perubahan Kewenangan Pemerintahan Daerah Khusus Jakarta (DKJ)	51
5.2.1	Kewenangan Legislasi DPRD Jakarta dalam Masa Transisi	53
5.3	Implikasi Pembentukan Ibu Kota Nusantara terhadap Status Jakarta.....	58
5.4	Peran Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Implementasi kewenangan	59
5.5	Pola Relasi antara Pemerintah Daerah Khusus Jakarta dengan Pemerintah Pusat dalam Struktur Politik Nasional	62
5.5.1	Potensi Konflik dan Ketegangan dalam Pengambilan Kebijakan.....	69
5.5.2	Model Relasi dan Overlapping	71
5.5.3	Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi.....	72
5.6	Implikasi Jangka Panjang Transformasi Jakarta.....	73

5.6.1 Strategi Pembangunan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Politik Nasional	75
5.6.2 Tantangan Sosial, Peran Partisipasi Masyarakat dan Lingkungan dalam Transformasi	79
BAB VI KESIMPULAN	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	88

